

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang dengan limpahan sumber daya yang besar seharusnya memiliki tujuan memaksimalkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dengan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi, dapat dicapai pembangunan nasional seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 berupa mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam pencapaian pembangunan nasional, pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi dengan tujuan memberi pemerintah daerah keleluasaan penuh untuk melaksanakan otonomi daerah dengan secara bertanggung jawab dan pengaturan kepentingan masyarakat sesuai potensi dan kondisi daerah (Fauzi, 2018). Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan dan mengatur kepentingannya sendiri. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah dengan tingkat ketergantungan yang minimal terhadap pemerintah pusat.

Menurut (Rahmadani, 2018) tujuan dari kebijakan pendapatan daerah adalah untuk peningkatan kemampuan daerah dalam pembiayaan urusan rumah tangga secara mandiri. Daerah memerlukan sumber pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan penerimaan daerah dan berupaya dalam peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun. Maka, setiap daerah tentu menghendaki adanya peningkatan pendapatan.

Merujuk pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah atau dapat disebut PAD diperoleh dari pungutan yang berdasarkan pada

peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cakupan sumber yang luas berupa pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, t.t.).

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur menyumbang besaran yang termasuk tinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ketiga dengan PAD terbesar di Indonesia, urutan pertama diduduki oleh Provinsi DKI Jakarta dan urutan kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Barat. Rata-rata PAD Provinsi Jawa Timur adalah 13,35% terhadap PAD Indonesia, sementara PAD Provinsi DKI Jakarta sebesar 14,39% terhadap PAD Indonesia (Kusnandar, 2022).

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan atau orang pribadi dengan sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak adanya imbalan secara langsung serta digunakan sebagai keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat (Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009). Kenaikan penerimaan pajak secara otomatis akan memberikan peningkatan kepada PAD, maka pemerintah daerah harus berupaya untuk mencapai peningkatan pajak dengan memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhinya (Yunimiartiningsih, 2017).

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, hotel merupakan fasilitas yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya yang dipungut bayaran, mencakup losmen, motel, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan kamar lebih dari

sepuluh, serta rumah penginapan dan sejenisnya (Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009). Apabila pertumbuhan hotel meningkat, maka akan meningkat pula pendapatan pajak daerah sebagai penerimaan daerah yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Solot, 2018). Hasil penelitian oleh Alyani & Kurnia Siwi (2020) menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh terhadap PAD. Sementara dalam penelitian (Dewi dkk., 2020a) ditemukan hasil bahwa jumlah hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran, mencakup kafetaria, rumah makan, warung, bar, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering (Undang-undang (UU) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009). Manalu dkk. (2021) melakukan penelitian dengan hasil bahwa jumlah restoran berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD. Sementara penelitian oleh Zulmi (2018), menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arti bahwa jika jumlah restoran meningkat, akan meningkatkan PAD.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah pendapatan perkapita (Yunimiartiningsih, 2017). Dengan hal ini, maka pendapatan perkapita mempengaruhi PAD. Pendapatan perkapita adalah besaran dari pendapatan rata-rata penduduk pada periode tertentu di suatu negara atau daerah atau juga dapat memiliki arti sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia untuk penduduk pada periode tertentu di suatu negara (Igir dkk., 2018). Dalam penelitian yang dilakukan Nimingge dkk. (2021) ditemukan bahwa pendapatan perkapita

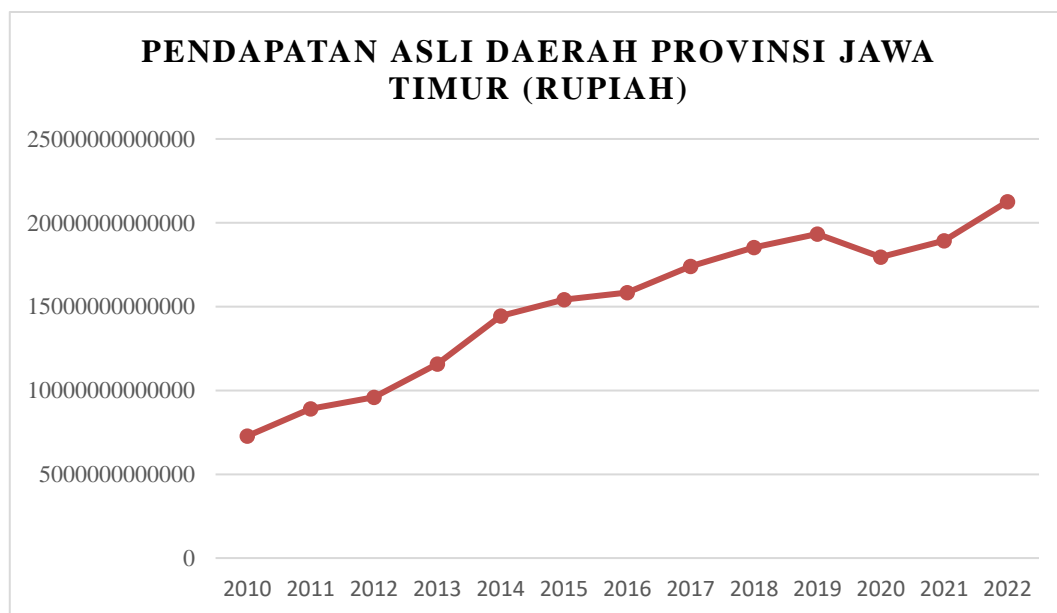
tidak berpengaruh terhadap PAD. Sementara hasil penelitian dari (Igir dkk., 2018) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap PAD.

Jumlah penduduk sebagai salah satu faktor ekonomi akan memberikan dampak baik bagi penerimaan daerah berupa PAD apabila mengalami peningkatan (Murib dkk., 2018). Disebutkan dalam Badan Pusat Statistik, penduduk merupakan semua orang yang berdomisili pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih atau yang berdomisili kurang dari satu tahun dengan tujuan untuk menetap. Berdasarkan penelitian oleh Dewi dkk. (2020) jumlah penduduk berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap PAD dengan artian bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan PAD. Namun, dalam penelitian oleh Murib dkk. (2018) jumlah penduduk berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap PAD yang berarti kenaikan jumlah penduduk akan mengakibatkan penurunan PAD.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 37 provinsi yang ada di Indonesia letaknya yang berada di ujung timur Pulau Jawa dan berbatasan dengan Jawa Tengah di bagian barat, Laut Jawa di bagian utara, Selat Bali di bagian timur, dan Samudera Hindia di bagian selatan. Jawa Timur terdiri atas 38 kabupaten dan kota yang berarti provinsi ini memiliki jumlah kabupaten dan kota paling banyak di Indonesia. Dalam *Outlook* Ekonomi Jawa Timur 2013, dijelaskan bahwa posisi Provinsi Jawa Timur diapit dua provinsi besar, yaitu Bali dan Jawa Tengah menjadikan Jawa Timur memiliki posisi strategis yang menjadikannya pusat pertumbuhan perdagangan dan industri (jatimprov.go.id, t.t.). Dengan kondisi ini, banyak orang berdatangan di Provinsi Jawa Timur untuk bekerja, membangun

bisnis, hingga melakukan ekspansi perusahaan. Dengan banyaknya orang yang melakukan pekerjaan di Jawa Timur, diperlukan pula fasilitas untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokok manusia berupa pangan dan papan. Dengan demikian, hotel dan restoran adalah sektor usaha yang perlu sangat penting dan perlu untuk dikembangkan.

Provinsi Jawa Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur, penduduk Provinsi Jawa Timur terdiri atas 93,13% berdomisili sesuai dengan KTP/KK dan 6,87% tidak sesuai dengan KTP/KK yang mengindikasikan banyaknya penduduk yang melakukan migrasi dari tempat tinggal sebelumnya menuju Jawa Timur (bappeda.jatimprov.go.id, 2021). Banyaknya jumlah penduduk menjadi faktor dalam perhitungan pendapatan perkapita, sehingga jumlah penduduk ini memberi pengaruh terhadap pendapatan perkapita.



Sumber: DPJK Kemenkeu yang diolah

Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Pada gambar 1, ditemukan bahwa selama tahun 2010 – 2022, PAD mengalami kenaikan dan penurunan. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 – 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi, sehingga diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta pembatasan pada aktivitas atau perjalanan selama masa liburan panjang. Hal ini memberi dampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pengeluaran masyarakat lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar dan mengurangi konsumsi pada barang yang dikenai Pajak Daerah Provinsi (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2020). Namun, peningkatan PAD segera terjadi setelah terpuruk karena pandemi di tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya kebijakan *new normal* dimana aktivitas ekonomi sudah mulai dapat beroperasi secara bertahap.

Peningkatan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk yang ada pada suatu daerah akan meningkatkan permintaan dan kebutuhan dari barang dan jasa. Dengan meningkatnya permintaan dan bertambahnya konsumsi, akan memberikan peningkatan pada penerimaan pemerintah. Selama tahun 2010 – 2022 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penduduk ini adalah akibat dari adanya kelahiran dan pekerja atau imigran yang datang ke Provinsi Jawa Timur untuk menetap sebagai penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini akan menyebabkan semakin banyaknya pula konsumen dari barang dan jasa yang menyebabkan perkembangan usaha sehingga akan dibayarkan pula pajak yang lebih besar, hal ini memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Ariyani dkk., 2018).

Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Apabila pendapatan tinggi, maka akan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban kepada pemerintah berupa pajak. Dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, maka PAD juga akan meningkat. Pendapatan perkapita di Provinsi Jawa Timur setiap tahun pada tahun 2010 – 2019 terus mengalami peningkatan. Namun, menurun pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan untuk mengurangi pengeluaran atau menyeimbangkan dengan pemasukan yang juga berkurang. Beberapa usaha juga harus menggulung tikar akibat pandemi karena adanya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat diluar ruangan dan aturan pengurangan kapasitas pengunjung pada tempat usaha, tidak terkecuali hotel dan restoran. Namun, pada tahun 2021 kembali terjadi peningkatan karena angka penularan penyakit mulai menurun dan pembatasan aktivitas sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan baru, yaitu *new normal*.

Saat ini, kegiatan wisata menjadi kegiatan yang diminati banyak orang bahkan dianggap sebagai kebutuhan. Dalam kegiatan wisata, perlu ditunjang dengan adanya restoran yang menyediakan kebutuhan makan dan minum, serta hotel sebagai tempat bersinggah. Bahkan, restoran sebagai fasilitas kuliner dapat menjadi pilihan wisata bagi masyarakat. Selain itu, hotel juga dapat menjadi tempat untuk berwisata karena di dalamnya memiliki fasilitas yang dapat dijadikan media rekreasi, seperti kolam renang, lapangan olahraga, hingga toko oleh-oleh.

Jumlah hotel yang ada di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sementara jumlah restoran terus mengalami peningkatan. Dengan penguatan restoran dapat menjadi upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, keberadaannya juga akan menopang wisata kuliner yang akan berdampak pada peningkatan PAD (Sanjaya & Wijaya, 2020). Pengembangan perhotelan secara baik dan benar diperlukan karena berperan sebagai penggerak pembangunan daerah yang dapat meningkatkan perluasan usaha, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, hingga PAD (Sabrina & Mudzhalifah, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah jumlah restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur

### **1.4 Ruang Lingkup**

1. Penelitian ini mencakup data *time series* atau runtut waktu periode tahun 2010 – 2022 pada Provinsi Jawa Timur.
2. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen berupa Jumlah Hotel, Jumlah Restoran, Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Penduduk.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi studi empiris yang menambah ilmu pengetahuan.